

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Caitlin Reiger and Marieke Wierda. "The Serious Crimes Process in Timor-Leste: In Retrospect." PROSECUTIONS CASE STUDIES SERIES. The International Center for Transitional Justice (ICTJ), 2006.
- Direktorat Pengolahan Deputy Bidang Konservasi Arsip. "Inventaris Arsip Bacharuddin Jusuf (B.J) Habibie 1959-2010." Arsip Nasional Republik Indonesia, 2022.
- Habibie, Bacharuddin Jusuf. *Detik-Detik Yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. THC Mandiri, 2006.
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. *Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu: Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok*. KontraS, 2008.
- Pratikno and Cornelis Lay. *Komnas HAM 1993-1997 Pergulatan Dalam Otoritarianisme*. Fisipol UGM, 2002.
- René Provost. *International Human Rights and Humanitarian Law*. Cambridge University Press, 2004.
- Smith, Rhona K.M., et.al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Usat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Susilo, Taufik Adi. *Lebih Dekat Dengan SBY*. Garasi House of Book, 2014.
- Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024)

Jurnal

- Adinugroho, Muhammad Ilham, and Asep Suherman. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan 2*, no. 01 (2024).
- Bone, Sholihin. "Penataan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Telaah Sistem Hukum." *Amanna Gappa 29*, no. 1 (2021): 15–25.
- Eka Auliana Pratiwi. "Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)." *HISTORIA: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah 2*, no. 2 (2019): 83–90.
- Fadhil, Moh. "Impunitas Dan Penerapan Keadilan Transisi: Suatu Dilema Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Di Masa Lalu." *Jurnal Petikum 8*, no. 2 (n.d.): 100–113.
- Fajar Nurhardianto. "Politik Hukum HAM Di Indonesia." *Jurnal TAPIS 10*, no. 2 (2014): 81–82.
- Fajar Nurhardianto. "Politik Hukum HAM di Indonesia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 10*, no. 2 (2014): 81–84.

- Firdiansyah. "Peran Dan Harapan Korban Untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu." *Jurnal HAM* (Jakarta) XIII, no. 1 (2016).
- Hadi, Sahid. "Merumuskan Peran Dominus Litis Pada Komnas Ham Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Ham Di Indonesia." *Jurnal Teropong* 7 (2019): 87–112.
- Hidayat, et.al. "Penyelesaian Komnas Ham Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Ham Di Indonesia." *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (2024): 115–22.
- Hutabarat, et.al. "Penegakan Ketidakadilan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia." *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 1 (2022): 25–42.
- Irawan, et.al. "Analisis Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 848–57.
- Jeffery, Renée, and Pia Dannhauer. "Ensuring Accountability, Combatting Impunity? The Role of National Human Rights Institutions in Transitional Justice." *Australian Journal of Human Rights* 30, no. 1 (2024): 60–81.
- Pangi Syarwi. "Polarisasi Isu , Politik Identitas Dan Keterbelahan Publik Pada Pemilu Presiden Tahun 2019." *Jurnal Communitarian* 4, no. 1 (2022): 593–602.
- Puspitasari, Sri Hastuti. "Komnas HAM Indonesia Kedudukan Dan Perannya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 21 (2016).
- Putra, Muhammad Amin. "Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2015): 256–92.
- Rizka Abigael Emping. "Pertanggungjawaban Penjahat Perang Dalam Perang Dunia II Serta Implikasinya Bagi Hukum Internasional." *Lex Et Societatis* VI, no. 10 (2018): 147–48.
- Rosita Indrayati. "Pemisahan Kementerian Hukum Dan HAM Pada Pemerintahan Baru: Dampak Dan Tantangan Dalam Sistem Pemerintahan." *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 187–89
- Salahudin Pakaya and Amin Dali. "Demokrasi Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia." *At-Tanwir Law Review* 1, no. 1 (2021).
- Sari, Artika Mulia, and Timbul Dompok. "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 23–37.
- Siregar, Dahris. "Penegakan Dan Perlindungan Hukum Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 5176–88.
- Turtiantoro. "Strategi PDI-Perjuangan Dalam Pemilu Presiden Dan Wapres Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Sosial* 14, no. 1 (2015): 39–46.
- Virdatul Anif and Galuh Mustika Dewi. "Arah Politik Hukum Kebijakan Perlindungan HAM Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 1, no. 1 (2017): 5–18.
- Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi. *MoU Helsinki: Menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Internasional, Dan Nasional)*. PeNA, 2024.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Mengadili Tindak Pidana Oleh Militer; Penanganan Extraordinary Crimes Oleh Komnas HAM (Kerusuhan Massa Di Sumbawa)*. Gramata Publishing. 2013.

Peraturan Perundang-Undangan, Putusan, dan Perjanjian Internasional

Charter of The International Military Tribunal (1945).

Charter of the United Nations (1945).

Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 006/Puu-Iv/2006 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi.

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

Kasus Abepura (2000), Putusan No.01.K/Pid.HAM.AD.HOC/2006.

Kasus Timor Timur (1999) (34/PK/PID.HAM.AD.HOC/2007).

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Dan Pengadilan Negeri Makassar.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 Tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia.

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict.

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography.

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009, § Agenda Pembangunan Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.
- Rome Statute of the International Criminal Court.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.
- Universal Declaration of Human Rights (1948).
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). “Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Truth Commissions.” In *The UN Human Rights Treaty System in the 21 Century*. United Nations, 2000. https://doi.org/10.1163/9789004502758_044.

Laporan

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), and Masa Persidangan. *Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI Dengan Ketua Komnas Ham Dan Ketua Komnas Perempuan*. 2026.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). *Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Kejaksaan Agung RI*. 2007.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). *Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2025-2029*. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/prolegnas-periodik/detail/RUU-tentang-Perubahan-atas-Undang-Undang-Nomor-39-Tahun-1999-tentang-Hak-Asasi-Manusia-705>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). *Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Jaksa Agung RI*. 2020.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). *RISALAH RESMI: Rapat Paripurna Ke-10, Masa Sidang I (2009-2010)*. 2009.
- Eva A. Zulfa, Nurhayati, Abul Supriyadhie, Usman Hamid, and Dhahana Putra. “Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Ham).” Pusat

- Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2012.
- Kejaksaan Agung. *Matriks Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029*. 2025.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)*. 2025.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Rencana Strategis 2025-2029*. 2025.
- Komnas HAM. “Merawat Ingatan Menjemput Keadilan: Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat.” Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan Instrumen HAM Nasional, 2020. Jakarta.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Laporan Tahunan 2023*. 2023. <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4vl>.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Laporan Tahunan 2024*. 2024.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Laporan Tahunan 2025*. 2025. <https://www.lpsk.go.id/publikasi/cmlk93n830007hggtuq7p1alb>.
- The Economic and Social Council. “ECOSOC Resolution 2005/30: Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, Principle I.” 2005. <https://www.un.org/en/ecosoc/docs/2005/resolution%202005-30.pdf>.
- The Indonesian National Human Rights Commission and Komnas HAM, Submission to the United Nations 3rd Universal Periodic Review 27th Session of The Working Group on the UPR Human Rights Council (2016).

Internet dan Lain-lain

- “Jadi Perbincangan Nasional, Pelanggaran HAM yang Berat Prioritas Bagi Komnas HAM.” Accessed November 10, 2025. <https://www.komnasham.go.id/jadi-perbincangan-nasional-pelanggaran-ham-yang-berat-prioritas-bagi-komnas-ham>.
- “Tentang Komnas HAM.” Accessed June 7, 2025. <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>.
- “Tentang Komnas HAM.” Accessed November 10, 2025. <https://www.komnasham.go.id/tentang-komnas-ham>.
- “UU KKR Bertentangan Dengan UUD 1945 | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Accessed January 15, 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1176>.
- Ayomi Amindoni. “Kejaksaan Agung kembalikan berkas kasus pelanggaran HAM berat, bagaimana komitmen Presiden Jokowi?” *BBC News Indonesia*, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46822119>.
- Catatan Satu Tahun Kick Off Rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat; Manipulasi Keadilan Dalam Belenggu Impunitas*. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2024. <https://kontras.org/laporan/catatan-satu-tahun-kick-off>

- rekomendasi-tim-penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-hak-asasi-manusia-yang-berat-manipulasi-keadilan-dalam-belenggu-impunitas
- Imaniah, Rosi. “Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Resmi Dilantik Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.” Presiden RI, October 20, 2024. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/prabowo-subianto-dan-gibran-rakabuming-raka-resmi-dilantik-sebagai-presiden-dan-wakil-presiden-ri/>.
- International Criminal Court. “About the Court.” Accessed June 28, 2026. <https://www.icc-cpi.int/about/the-court>.
- International Criminal Court. “About The Court: Office of the Prosecutor.” Accessed June 28, 2026. <https://www.icc-cpi.int/about/otp>.
- International Criminal Court. “How the Court Works: Jurisdiction.” Accessed January 7, 2025. <https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works>.
- International Criminal Court. “Understanding the International Criminal Court.” Publication. 2020. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/understanding-the-icc.pdf>.
- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (@kementerian_ham). “Uji Publik RUU Perubahan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” Instagram Post. May 11, 2026. https://www.instagram.com/setjen_kemenham/p/DYMG6VSEyH8/.
- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI). “Komnas HAM Akan Miliki Kewenangan Penyidikan, KemenHAM Perkuat Langkah Strategis Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat.” KemenHAM RI. Accessed April 10, 2026. <https://origin.kemenham.go.id/publikasi/komnas-ham-akan-miliki-kewenangan-penyidikan-kemenham-perkuat-langkah-strategis-tuntaskan-pelanggaran-ham-berat>.
- Kompas, Tim Harian. “Pendataan Korban Pelanggaran HAM Berat Masih Terkendala.” Kompas.id, January 16, 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/16/pendataan-korban-pelanggaran-ham-berat-masih-terkendala>.
- Media, Kompas Cyber. “Mahfud: Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Selalu Gagal Dibuktikan di Pengadilan.” KOMPAS.com, June 27, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/27/14372261/mahfud-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-selalu-gagal-dibuktikan-di-pengadilan>.
- Mimin Dwi Hartono. “18 Tahun Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei.” Accessed April 20, 2026. <https://www.komnasham.go.id/18-tahun-tragedi-trisakti-dan-kerusuhan-mei>.
- Negara, Kementerian Sekretariat. “Presiden Jokowi Sesalkan Terjadinya Pelanggaran HAM Berat Di Tanah Air | Sekretariat Negara.” Accessed November 7, 2025. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_sesalkan_terjadinya_pelanggaran_ham_berat_di_tanah_air.
- Sulteng, SKP-HAM. “Inilah 12 Pelanggaran HAM Berat yang Diakui Presiden Jokowi.” *SKP-HAM Sulawesi Tengah*, January 13, 2023. <https://www.skp-ham.org/inilah-12-pelanggaran-ham-berat-yang-diakui-presiden-jokowi/>.

- Suparman Marzuki. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Pada Era Reformasi: Studi Tentang Penegakan Hukum HAM Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu." Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Tempo. "Jaksa Agung: Komnas Tak Bisa Hadirkan Bukti Kasus HAM Masa Lalu | tempo.co." January 16, 2020. <https://www.tempo.co/hukum/jaksa-agung-komnas-tak-bisa-hadirkan-bukti-kasus-ham-masa-lalu-663809>.
- Tempo. "Uji Publik Formalitas Penulisan Ulang Sejarah Indonesia | tempo.co." Agustus | 13.00 WIB 2025. <https://www.tempo.co/politik/formalitas-uji-publik-penulisan-ulang-sejarah-2056005>.
- TV, Metro. "Menteri Pigai Lempar Tugas ke Wamen Urus Penanganan Pelanggaran HAM Berat." <https://www.metrotvnews.com>. Accessed November 16, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/bzGCRj8y-menteri-pigai-lempar-tugas-ke-wamen-urus-penanganan-pelanggaran-ham-berat>.
- United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. "View the Ratification Status by Country or by Treaty." Accessed November 16, 2025. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=80&Lang=EN.
- RI, DPR. "Situs Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia - DPR RI." Accessed November 17, 2025. <https://www.dpr.go.id>.
- RI, DPR. "RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi." RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Accessed April 12, 2026. <https://www.dpr.go.id>.
- Guidance Note of the Secretary-General United Nations Approach to Transitional Justice*. 2010. https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). *Surat DPR RI kepada Presiden RI Nomor RU.02/5979/DPR-RI/2006 perihal Persetujuan terhadap RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. n.d.
- United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. *Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation*. Summary. United Nations, 2013. <https://doi.org/10.18356/58576336-en>.
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). *Pengadilan HAM Timor Timur; Pelajaran Nurani Bagi Bangsa Indonesia*. 2002.
- YLBHI. "Putusan Bebas Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Bukti Negara Tidak Memiliki Komitmen Pemenuhan Hak Atas Keadilan Bagi Korban." Siaran Pers. December 2022. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/putusan-bebas-kasus-pelanggaran-ham-berat-paniai/>.

LAMPIRAN

Lampiran 1

UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER ILMU HUKUM

Nama : Alfina Sabila
NIM. : 22/500801/PHK/11969
Perihal : Wawancara Komisioner Komnas HAM
Narasumber : Anis Hidayah, S.H., M.H.
Tema Wawancara : Penegakan Hukum HAM di Indonesia

Daftar Topik Wawancara:

1. Bagaimana pandangan Ibu sebagai Komisioner Komnas HAM melihat perkembangan kasus pelanggaran HAM berat saat ini?
2. Bagaimana Ibu memandang peran dari aktor-aktor negara tersebut, khususnya yang berperan di Pengadilan HAM, dan apakah terdapat tantangan atau kesulitan tersendiri bagi penyelidik pada saat melakukan penyelidikan?
3. Jaksa Agung memberikan pernyataan bahwa salah satu kendala untuk menangani PHB adalah kurangnya bukti, bagaimana tanggapan Ibu terhadap pernyataan tersebut, apakah bukti sulit didapatkan atau terdapat faktor lainnya?
4. Bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai keseriusan pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia?
5. Bagaimana negara Indonesia akan menanggapi dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum diadili di kemudian hari?
6. Menurut Ibu siapa saja yang berperan penting untuk mendukung dan mewujudkan UU KKR ini untuk segera disahkan?

Lampiran 2

UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER ILMU HUKUM

Nama : Alfina Sabila
NIM. : 22/500801/PHK/11969
Perihal : Wawancara Komisioner Komnas HAM
Narasumber : Dr. Uli Parulian Sihombing, S.H., M.H.
Tema Wawancara : Penegakan Hukum HAM di Indonesia

Daftar Topik Wawancara:

1. Tugas dan Fungsi Komnas HAM serta peran Bapak Uli Parulian sebagai Komisioner dalam bidang penegakan, pemantauan, penyelidikan, dan pengawasan HAM dalam rangka penegakan hukum HAM?
2. Apa tantangan atau hambatan yang Bapak Uli Parulian alami ketika sedang menjalankan tupoksi Bapak?
3. Bagaimana peran dan upaya pemerintah dalam menegakan hukum HAM, khususnya terhadap kasus pelanggaran HAM berat?
4. Mengapa terdapat beberapa kasus yang belum bisa diadili hingga saat ini?
5. Menurut Bapak apa saja catatan penting bagi negara Indonesia untuk mewujudkan penegakan HAM yang komprehensif?

Lampiran 3

UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER ILMU HUKUM

Nama : Alfina Sabila
NIM. : 22/500801/PHK/11969
Perihal : Wawancara Komisioner Komnas HAM
Narasumber : Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.
Tema Wawancara : Penegakan Hukum HAM di Indonesia

Daftar Topik wawancara:

1. Bagaimana Bapak melihat kondisi penegakan HAM di Indonesia saat ini, secara umum?
2. Apa saja program utama Komnas HAM dalam bidang pendidikan dan penyuluhan hak asasi manusia?
3. Sejauh mana pendidikan HAM kepada masyarakat berkontribusi terhadap penegakan HAM?
4. Apa tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia, terutama pelanggaran HAM berat?
5. Menurut Bapak, apa saja peluang dan prospek yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk memperbaiki sistem penegakan hukum HAM?